

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Sragen

Halaman 2

Anggaran Desa Rp 135 Juta Diduga Menguap

Warga Gilirejo Baru Resah dan Minta Diusut

SRAGEN-Warga Desa Gilirejo Baru Kecamatan Miri Sragen resah, Selasa (9/10). Pasalnya, anggaran pembangunan di desa kawasan Waduk Kedung Ombo (WKO) sekitar Rp 135 juta diduga menguap.

Diantaranya anggaran pembangunan Mushola di lingkungan kantor balai desa setempat, senilai Rp 35 juta tak jelas. Lantaran anggaran pembangunan tempat ibadah yang telah dipa-

cak melalui Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2017 hingga saat ini belum ada realisasi. Tidak hanya itu, warga juga menyoroti Dana Desa (DD) Tahun 2018 untuk tahap per-

tama senilai Rp 300 juta untuk sarana prasarana (sarpras) juga tidak jelas.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) Desa Gilirejo Baru Paimin menjelaskan, ada sejumlah persoalan dalam penggunaan anggaran ADD maupun DD di Desa Gilirejo Baru. Pertama anggaran pembangunan mushola balai desa sebesar Rp 35 juta yang dipacak tahun 2017, hingga saat ini tidak terealisasi.

"Lantas anggaran itu kemana?. Tentunya ada laporan

■ Baca **ANGGARAN DESA...** hal 15

fiktif dari penggunaan ADD, karena bangunan mushola tidak diperbaiki, kondisinya masih memprihatinkan. Sehingga kami memastikan dana sebesar Rp 35 juta menguap," tandas Paimin.

Tidak hanya pembangunan mushola, kata Paimin, ada sejumlah anggaran yang telah dipacak DD 2018 sebesar Rp 300 juta, untuk sarpras tahap pertama dengan lokasi Gilirejo Baru RT 02 dan RT 03, namun yang terealisasi hanya Rp 200 juta.

"Untuk sisa Rp 100 juta kegunaannya tidak jelas, sehingga anggaran perlu diawasi kembali larilya kemana," tutur Paimin.

Paimin menjelaskan, di Desa Gilirejo Baru, sebenarnya banyak sumber dana dari ADD dan DD serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Hanya saja, selama ini peruntukan maupun penggunaannya tidak jelas. Sehingga desa yang masuk di kawasan Waduk Kedung Ombo (WKO) ini tidak maju untuk

pembangunannya.

"Melihat kondisi itu, kami sendiri berharap Pemkab Sragen turun tangan, sehingga warga bisa mengakses kegiatan pembangunan di desa Gilirejo Baru. Dengan pengawasan yang ketat, anggaran pembangunan bagi desa bisa digunakan secara maksimal pemanfaatannya," tegas Paimin.

Sementara Forum Masyarakat Sragen (Formas) mengaku siap mengawal pembangunan di Desa Gilirejo Baru, menyusul adanya aduan dari masyarakat setempat soal penggunaan ADD/DD di desa kawasan WKO tersebut.

"Kami akan segera melaporkan indikasi penyimpangan penggunaan anggaran ADD/DD di Desa Gilirejo Baru itu ke kejaksaan. Munculnya temuan itu, sebagai bentuk lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah, sehingga perlunya peran serta masyarakat desa setempat," tutur Wahono Ketua Bidang Hukum dan HAM Formas

Sragen.

Disisi lain, Kejaksaan Sragen saat ini sedang mengusut empat kasus dugaan korupsi yang melibatkan empat kepala desa.

Diantaranya dugaan penyimpangan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Purwosuman, Kecamatan Sidoharjo sebesar Rp 50 juta.

Penyimpangan ADD/DD Desa Ngandul, Kecamatan Sumberlawang, sebesar Rp 100 juta. Penyimpangan ADD/DD di Desa Newung, Kecamatan Sukodono sebesar Rp 40 juta dan pengusutan pengadaan Komputer Sistem Informasi DDesa (SID) di 196 desa, Sragen.

"Di Pidana Khusus (Pidsus) pada tahun ini kegiatan empat kasus, diantaranya tiga penyelidikan, satu penyidikan dan satu eksekusi. Penuntutan sudah putus terdakwa Kades Hadiluwih, Sumberlawang, Wiranto yang sudah inkrah. Penyidikan satu yakni kasus Kades Doyong," ujar M. Sumartono Kajari Sragen. (ars/saf)